



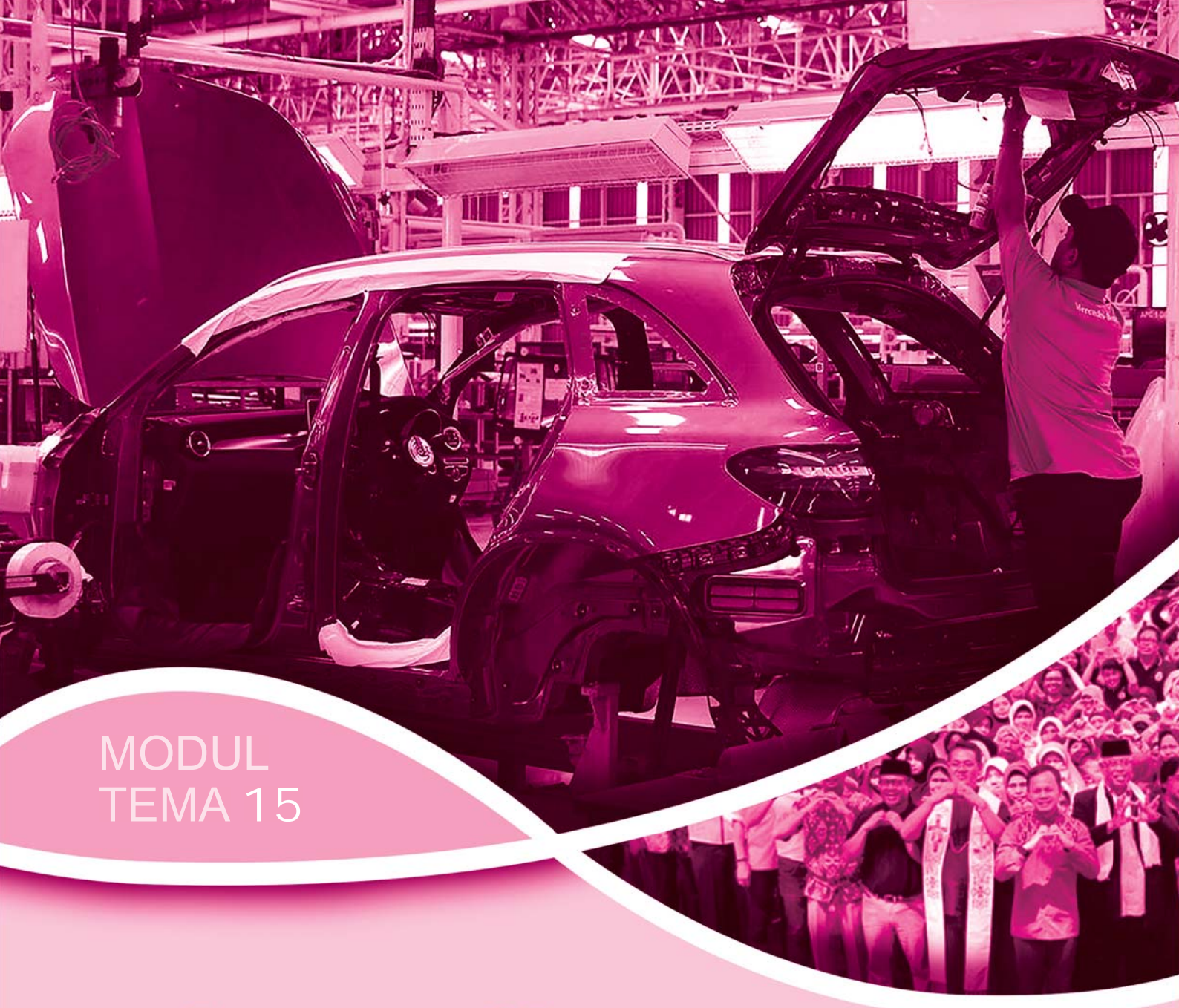
MODUL
TEMA 15

Dinamika Menuju Harmoni

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020



MODUL
TEMA 15

Dinamika Menuju Harmoni

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII
Modul Tema 15 : Dinamika Menuju Harmoni

- **Penulis:** Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 52 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan Setelah Mempelajari Modul	3
Pengantar Modul	3
UNIT 1. AMAN DI DAERAH, NEGARA NYAMAN	7
URAIAN MATERI	7
A. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Politik dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	7
B. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Pertahanan Keamanan Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	10
C. Daerah yang Maju dan Aman untuk Memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika	18
Penugasan 1	23
UNIT 2. SEJAHTERA DI DAERAH, NEGARA MAKMUR	24
URAIAN MATERI	24
A. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	24
B. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	30
C. Daerah yang Mandiri dan Rukun untuk Memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika	34
Penugasan 2	38
Latihan Soal	38
Rangkuman	42
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian	43
Kriteria Pindah Modul	49
Saran Referensi	50
Daftar Pustaka	50
Profil Penulis	52



DINAMIKA MENUJU HARMONI

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Selamat bertemu dalam pembelajaran Modul 15 dengan judul “Dinamika Menuju Harmoni”. Modul yang Anda pelajari ini adalah modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Paket C setara SMA Kelas XII . Tema yang dipelajari dalam modul ini adalah mengidentifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi konteks daerah terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tema modul akan diuraikan dalam materi-materi yang terbagi di dalam 2 unit. Setiap unit dilengkapi dengan tugas-tugas yang dimaksudkan untuk membimbing Anda lebih tekun belajar dan mendalami pengetahuan seputar tema modul. Uraian modul mengikuti unit, materi, dan penugasan yang garis besarnya dinyatakan dalam tabel sebagai berikut.

No	Unit	Materi	Penugasan
1	Aman di Daerah, Negara Nyaman	<p>A. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Politik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>B. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Pertahanan Keamanan Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar dalam pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel.

No	Unit	Materi	Penugasan
		C. Daerah yang Maju dan Aman untuk Memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika	
2	Sejahtera di Daerah, Negara Makmur	<p>A. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>B. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>C. Daerah yang mandiri dan rukun untuk memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika</p>	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar dalam pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel.

Dalam mempelajari modul ini, Anda dapat melalui kegiatan mandiri atau secara kelompok dengan Warga Belajar lain. Bisa juga melalui kegiatan tutorial dengan bimbingan dari Tutor. Bila Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan mandiri dapat berkonsultasi dengan Tutor. Anda hendaknya membaca modul ini secara utuh dari awal sampai akhir dengan harapan dapat memahami materi secara sistematis. Anda juga harus mengerjakan tugas dalam setiap unit pembelajaran untuk mengukur ketercapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi penilaian dalam modul ini. Anda dapat dinyatakan menguasai kompetensi dalam modul ini bila penilaian sikap minimal **Baik** (dari Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang), penilaian aspek pengetahuan minimal nilai **75** (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65), dan penilaian aspek keterampilan minimal nilai **75** (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65). Oleh karena untuk memastikan ketercapaian pembelajaran, Anda dapat mengkonfirmasi kepada Tutor. Bila sudah dinyatakan telah mencapai batas penilaian minimal, maka Anda dapat mempelajari modul berikutnya.

Selamat belajar dan sukses dalam meraih masa depan.

Tujuan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh Anda setelah mempelajari modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

- Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif melalui keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- Mengidentifikasi dengan cara menunjukkan data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks daerah.
- Mempresentasikan hasil identifikasi dengan cara menunjukkan data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks daerah.

Pengantar Modul

Perhatikan gambar dan berita di bawah ini!

RI Genjot Pembangunan Pelabuhan, Tiga Hal Ini Harus Diperhatikan

Dana Aditiasari – detikFinance, Jumat, 21 Jun 2019 16:51 WIB



Sumber: <https://finance.detik.com/infrastruktur>

Gambar 15.1 Suasana di salah satu pelabuhan di Indonesia Foto: Pradita Utama

Jakarta - Biaya logistik di Indonesia berkontribusi sebesar 117% dari biaya produksi. Biaya logistik juga menghabiskan 24,6% dari produk domestik bruto. Untuk itu, pemerintah tengah menggenjot beberapa pengembangan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah strategis di Indonesia. Di antaranya adalah pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan yang masif perlu diarahkan agar tepat sasaran.

Pakar Kemaritiman dari ITS, Saut Gurning mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.

“Pemerintah perlu lebih aktif mendorong adanya sinergi dan kolaborasi ketiga unsur yang ada dalam konsep trilogi maritim, yaitu standarisasi pelabuhan, aliansi pelayaran, dan industri yang terakses baik dengan pelabuhan,” papar dia, Jumat (21/6/2019).

Menurutnya, partisipasi keuangan pemerintah perlu lebih dioptimalkan. Untuk wilayah jasa kepelabuhanan yang komersial, fiskal pemerintah lewat penganggaran APBN perlu didorong pada alokasi pendanaan biaya operasi ketimbang biaya modal.

Sementara bagi wilayah jasa yang non-komersial partisipasi pemerintah perlu aktif dan hadir dalam urusan penyediaan biaya kapital bagi infrastruktur dermaga, peralatan bongkar-muat, SDM, hingga armada kapal serta infrastruktur.

“Ke depannya, usaha menstimulasi pendanaan daerah lewat BUMD serta perbankan daerah perlu dilakukan guna mengeksplorasi kepentingan daerah, dengan memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usaha jasa kepelabuhanan di daerah,” jelas Saut.

Lebih jauh dia menjelaskan, konsep trilogi maritim yang diusulkan PT Pelabuhan Indonesia II/IPC merupakan ide dan pola yang baik guna meningkatkan kinerja pengelola kepelabuhanan, pelaku industri pelayaran, serta dunia usaha yang berorientasi ekspor.

Jika direalisasikan, ide Trilogi Maritim akan menekan biaya logistik nasional, sehingga bisa lebih bersaing dengan sejumlah negara tetangga.

“Sebenarnya dari tiga parameter yang diusulkan tidak ada yang baru. Namun karena ketiga faktor tersebut menjadi satu paket usulan, maka ketiga variabel yang diusulkan menjadi menarik, yaitu standarisasi (kinerja dan fasilitas) pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, serta aksesibilitas bagi kawasan industri,” katanya.

Menurut Saut, standarisasi pelabuhan telah diinisiasi pemerintah, khususnya terkait kinerja operasi pelabuhan. Terkait aliansi dengan pelayaran, sudah banyak dermaga dan terminal di lingkungan BUMN juga dikolaborasikan dengan sejumlah perusahaan pelayaran yang dikenal dengan istilah dedicated terminal.

Terkait integrasi pelabuhan dan kawasan industri, menurut Saut sudah diupayakan di berbagai pelabuhan, baik di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

“Jadi orientasinya tidak hanya untuk kepentingan profit secara internal bagi operator pelabuhan, namun juga bagi kepentingan dan manfaat industri pelayaran serta industri produsen dan pengolah barang. Jadi secara kolektif memberikan manfaat bagi ekosistem terkait jasa kepelabuhanan nasional,” jelas Saut lagi. Meski begitu, katanya, wacana Trilogi maritim ini tetap memiliki tantangan, yaitu cara pandang para pelaku usaha jasa kepelabuhanan terkait) yang cenderung fokus pada kepentingan entitasnya saja.

Ada resistensi internal untuk berinteraksi antar pelaku usaha untuk bersama-sama memberikan nilai tambah ekonomi secara bersama.

“Saya kira, usaha untuk melakukan kolaborasi antara operator pelabuhan (termasuk layanan stevedoring di internal BUP dan PBM), pelayaran dan pemilik barang harus diusahakan, baik oleh berbagai usaha BUMN maupun swasta, juga BUMD,” tandas dia. **(dna/zlf)**

Sumber: <https://finance.detik.com/infrastruktur/>

Contoh berita dengan judul “RI Genjot Pembangunan Pelabuhan, Tiga Hal Ini Harus Diperhatikan” berisi data pembangunan pelabuhan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam data tersebut dinyatakan, bahwa pembangunan pelabuhan di berbagai daerah di Indonesia harus memperhatikan standarisasi (kinerja dan fasilitas) pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, dan aksesibilitas bagi kawasan industri. Data yang tersajikan semacam ini merupakan contoh data kualitatif. Tetapi dalam berita tersebut juga diungkapkan data kuantitatif, yakni “Biaya logistik di Indonesia berkontribusi sebesar 117% dari biaya produksi. Biaya logistik juga menghabiskan 24,6% dari produk domestik bruto.” Isi data dalam berita merupakan data pembangunan bidang ekonomi, karena memuat “pembangunan pelabuhan” yang dampak terbesarnya dalam bidang ekonomi. Dengan pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia akan berdampak pada lancarnya distribusi barang dan jasa. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibaca dari berita tersebut adalah kajian ilmiah yang menyimpulkan, bahwa pembangunan pelabuhan di berbagai

daerah di Indonesia harus memperhatikan standarisasi (kinerja dan fasilitas) pelabuhan, kolaborasi dengan pelayaran, dan aksesibilitas bagi kawasan industri. Pembangunan pelabuhan di berbagai daerah Indonesia memiliki konteks daerah dan berkontribusi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu akan menghubungkan berbagai wilayah Indonesia sebagai satu-kesatuan.

Pemahaman terhadap data sebagaimana dalam penjelasan di atas hanya dimungkinkan apabila Anda memahami apa itu data dan jenis-jenis data. Data adalah sekumpulan informasi hasil pencatatan atas suatu kejadian (Martono, 2015: 64). Data sebagai hal-hal yang diketahui sebagai fakta dan gambar sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan (Martono, 2015: 64). Jenis data dibedakan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar (Martono, 2015: 64). Data kualitatif menunjukkan mutu dari sesuatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa, dan hal-hal lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan (Nawawi, 2006: 49). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Martono, 2015: 64). Data kuantitatif dinyatakan dalam bentuk jumlah yang dapat dihitung secara matematik (Nawawi, 2006: 53). Bagaimana data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks daerah? Di bawah ini akan diuraikan materi pembelajaran tentang “Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Daerah Bidang Politik, Bidang Pertahanan Keamanan Negara, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya dalam Memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika”. Bacalah dengan cermat uraian materi pembelajaran di bawah ini.

UNIT 1

AMAN DI DAERAH, NEGARA NYAMAN

Uraian Materi

A. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Politik dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Apakah pembangunan bidang politik itu? Pembangunan bidang politik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019 antara lain berupa konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik, peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Di sisi lain, Nugroho dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1, No. 1, 2012* menyatakan, bahwa dengan keberhasilan dari arus reformasi yang terjadi dalam proses pembangunan politik di Indonesia memberikan beberapa keuntungan yang berpengaruh dalam kehidupan politik. Keuntungan tersebut antara lain terbentuknya puluhan partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi dan tradisi politik yang bervariasi, kebebasan berpendapat di media massa, partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik tumbuh subur, diterapkan desentralisasi dan otonomi daerah, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan, serta kampanye perlindungan HAM semakin marak.

Pembangunan bidang politik tidak hanya berpengaruh yang memberikan beberapa keuntungan dalam kehidupan politik di Indonesia, tetapi juga mencata beberapa kelemahan di dalamnya. Kelemahan tersebut antara lain dicatat oleh Nugroho dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1, No. 1, 2012* berupa pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif dan yudikatif, munculnya puluhan partai baru tidak memberikan rasa optimisme pada masyarakat, namun justru menciptakan rasa pesimis, skeptis bahkan sikap sinis karena jauh dari upaya menyejahterakan rakyat, dugaan adanya kecurangan pemilu berupa praktik penggelembungan suara pada salah satu partai politik, dan praktik jual beli suara (*money politics*).

Bagaimana data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah bidang politik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, berarti penggunaan ilmu pengetahuan dapat berupa konsep, teori, dan paradigma keilmuan yang didasarkan pada hasil riset atau penelitian. Sedangkan kemajuan teknologi berarti penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia yang memperlancar pekerjaan, efisiensi, akurasi, dan efektif. Data yang menunjukkan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah bidang politik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Contoh kebebasan berpendapat di media massa di daerah. Media sangat leluasa dalam mencari dan menyebarkan informasi pada publik. Rakyat tidak dihalang-halangi ketika hendak menyampaikan aspirasinya. Keterbukaan bagi seluruh elemen masyarakat dalam melontarkan kritik dan saran kepada penguasa di ruang publik. Coba perhatikan kutipan berita di bawah ini.

Politik Uang Jelang Pilkada Dinilai Semakin Rawan Saat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 15/05/2020, 12:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik politik uang jelang Pilkada 2020. Di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, politik uang menjadi praktik yang lebih rawan terjadi. "Di masa pandemi ini, ada kekhawatiran kami politik uang akan semakin meningkat," kata Ratna melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020). "Dalam kondisi ini masyarakat memerlukan bantuan sehingga ada kekuatan baru untuk memberikan uang atau memberikan barang tapi sebagai kepentingan politik," tuturnya.

Ratna mengatakan, sebelum Covid-19 menjadi pandemi, angka politik uang yang dicatat Bawaslu sudah cukup tinggi. Jumlah tersebut sangat mungkin meningkat, apalagi calon kepala daerah petahana diprediksi bakal maju di 230 dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Kondisi ini semakin rawan dengan sulitnya ekonomi akibat pandemi yang disebabkan virus corona itu. "Jadi bertemunya dua kepentingan antara calon (petahana) dan penerima dikhawatirkan akan meningkatkan angka politik uang. Sehingga kekhawatiran kami nantinya bahwa masyarakat tidak akan melaporkan politik uang," ujar Ratna.

Menurut Ratna, praktik politik uang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen, baik masyarakat atau penyelenggara pilkada. Namun, ia mengaku

bahwa Bawaslu akan terus melakukan tindakan pencegahan. "Sebagai bagian penting untuk mencegah terjadinya politik uang, kami sudah meluncurkan beberapa desa anti politik uang. Ini antisipasi kami karena melihat pada pilkada sebelumnya angka politik uang sangat tinggi," kata Ratna.

Menurut Ratna, praktik politik uang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen, baik masyarakat atau penyelenggara pilkada. Namun, ia mengaku bahwa Bawaslu akan terus melakukan tindakan pencegahan. "Sebagai bagian penting untuk mencegah terjadinya politik uang, kami sudah meluncurkan beberapa desa anti politik uang. Ini antisipasi kami karena melihat pada pilkada sebelumnya angka politik uang sangat tinggi," kata Ratna.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Sumber: <https://nasional.kompas.com/>

Penulis : Fitria Chusna Farisa

Editor : Bayu Galih

Data dalam berita berkenaan dengan konteks daerah, yakni tentang pilkada (pemilihan kepada daerah). Data juga berhubungan dengan pembangunan bidang politik yang berisi praktik politik uang dalam pemilihan kepada daerah. Secara lengkap indentifikasi terhadap data dalam berita tersebut sebagai berikut.

1. Adanya lembaga negara yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia.
2. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik politik uang jelang Pilkada 2020.
3. Di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, praktik politik uang rawan terjadi dalam Pilkada 2020 kalau dilaksanakan.
4. Sebelum Covid-19 menjadi pandemi, angka politik uang yang dicatat Bawaslu sudah cukup tinggi.
5. Calon kepala daerah petahana diprediksi bakal maju di 230 dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

6. Bertemunya dua kepentingan antara calon petahana dan penerima dikhawatirkan akan meningkatkan angka politik uang, akibat terpuruknya ekonomi masa pandemi Covid-19.
7. Kekuatiran Bawaslu nantinya, bahwa masyarakat tidak akan melaporkan politik uang,
8. Praktik politik uang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh elemen, baik masyarakat atau penyelenggara pilkada.
9. Bawaslu akan terus melakukan tindakan pencegahan politik uang dalam pilkada.
10. Bawaslu sudah meluncurkan beberapa desa anti politik uang.
11. Pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
12. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September 2020. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember 2020.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang politik yang memungkinkan menangkap pesan berita dengan cepat dan akurat, berbagai pihak dapat mengambil simpulan dan menentukan sikap. Misalnya calon kepala daerah yang akan ikut kontestasi harusnya menjauhi praktik politik uang. Bukan saja karena diawasi oleh Bawaslu, tetapi juga akan menurunkan derajat demokrasi dengan membeli suara rakyat. Bawaslu akan mengambil peran aktif untuk meniadakan praktik politik uang. Tindakan Bawaslu merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik. Bagi masyarakat yang memiliki hak pilih hendaknya menyadari, bahwa politik uang merupakan pelanggaran etik dan hukum. Bentuk pelanggaran etik karena suara masyarakat dapat dibeli melalui politik uang akibat terpuruknya ekonomi masa pandemi Covid-19. Bentuk pelanggaran hukum karena melanggar undang-undang pemilihan umum yang pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu. Masyarakat di daerah yang melaksanakan pilihan kepala daerah juga dapat memilih calon yang memiliki kompetensi dan jujur karena tidak melaksanakan praktik politik uang.

B. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Pertahanan Keamanan Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Pembangunan bidang pertahanan keamanan negara sejalan dengan RPJM Nasional tahun 2015-2019, antara lain berupa peningkatan hubungan luar negeri, memperkuat institusi pertahanan keamanan negara, memajukan industri pertahanan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pertahanan keamanan negara. Peningkatan hubungan luar negeri berupa pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, meningkatkan kualitas

perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri, melindungi hak dan keselamatan pekerja migran, dan memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional. Penguatan institusi pertahanan keamanan negara antara lain penguatan sistem pertahanan, memperkuat jatidiri sebagai negara maritim, dan membangun epolisian Republik Indonesia yang professional. Kemajuan industri pertahanan ditempuh dengan pembangunan industri pertahanan nasional. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pertahanan keamanan negara dilakukan dengan meminimalisasi dampak globalisasi dan peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan keamanan negara dapat berupa analisis yang akurat terhadap situasi global melalui studi ilmiah

sehingga pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif menguntungkan bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri dapat dilakukan dengan membuat perjanjian bilateral dengan negara lain atau berkontribusi secara aktif dalam organisasi internasional. Cara tersebut juga dapat dilakukan dalam upaya melindungi hak dan keselamatan pekerja migran, serta memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional. Hal ini antara lain akan berpengaruh dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Perhatikan contoh kasus di bawah ini.

BP3TKI PADANG BANTU PULANGKAN MARDIANIS

23 December 2019

PADANG, BNP2TKI (23/12) – Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang membantu kepulangan Mardianis, pekerja migran yang berangkat kerja ke Malaysia tanpa memenuhi prosedur penempatan yang ada. Petugas BP3TKI Padang dan keluarga Mardianis telah menunggu kepulangannya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada hari Senin, 23 Desember 2019.

“Kasus Mardianis diketahui sejak pihak keluarga melakukan pengaduan kepada BP3TKI Padang pada November silam. Pihak keluarga menceritakan terkait permasalahan Mardianis bekerja di luar negeri dan meminta agar yang bersangkutan dipulangkan. Maka, kami pun menghubungi pihak KBRI Kuala Lumpur untuk bekerjasama, sehingga ia dapat dipulangkan”, ungkap Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Padang, Valerie Cristhie Fasila, S.Pd.

Mardianis yang berasal dari Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ini berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai pengasuh anak di Selangor pada pertengahan Agustus 2019 lalu. Ia diajak oleh seorang yang bernama Iwit dan melakukan perjalanan ke Malaysia via Dumai. Iwit menjanjikan bahwa majikan di Malaysia akan mengajinya sebesar RM.1.000 per bulan dan diberikan waktu cuti. Setelah beberapa bulan bekerja ternyata Mardianis tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan. Ia hanya digaji sebesar RM 450, cuti pun tidak diberikan. Mardianis pun sulit untuk menghubungi keluarganya yang berada di Indonesia karena alat komunikasi yang ia bawa disita oleh majikan.

“Mardianis berangkat secara ilegal ke Malaysia. Ia tidak memiliki dokumen yang lengkap termasuk perjanjian kerja yang seharusnya disana tercantum berapa gaji yang diterima saat bekerja di Malaysia. Ia pun tidak terdaftar sebagai PMI yang bekerja di luar negeri, sehingga memang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak semestinya di luar negeri. Kami pun menduga bahwa ini merupakan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” tambah Valerie.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang dikenal dengan TPPO merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

“Untuk selanjutnya, kami akan mendampingi Mardianis untuk melapor ke Polda Sumbar terkait kasus yang dialaminya. Upaya ini merupakan bentuk komitmen BP3TKI Padang bersama Satuan Tugas Penempatan dan Perlindungan TKI asal Sumatera yang termasuk didalamnya kepolisian, agar memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Barat:”, imbuh Valerie.

**** (humas/bp3tkipadang/dba)**

Sumber: <https://bp2mi.go.id/program-detail/bp3tki-padang-bantu-pulangkan-mardianis/Integrasi%20Informasi%20&%20Pengaduan>

Dengan mempergunakan analisis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan keamanan negara, Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Padang bergerak cepat membantu keputusannya Mardianis dengan menghubungi pihak KBRI Kuala Lumpur. Di samping itu BP3TKI Padang akan mendampingi Mardianis untuk melapor ke Polda Sumbar terkait kasus yang dialaminya. Upaya ini merupakan bentuk komitmen BP3TKI Padang bersama Satuan Tugas Penempatan dan Perlindungan TKI asal Sumatera yang termasuk di dalamnya kepolisian, agar memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Barat. Hal itu sesuai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus ini jangan hanya dipahami sebagai kasus individu, TKI yang bernama Mardianis, tetapi bila terselesaikan dengan baik terdapat beberapa hal yang mengganggu kehidupan bidang pertahanan keamanan negara. Misalnya, bisa saja saling ketidakpercayaan terhadap TKI oleh negara penerima atau sebaliknya negara penerima sengaja mencari TKI yang ilegal dengan bayaran murah. Bahkan bila perlu diusir tanpa memberi upah karena datang secara ilegal. Atau mungkin terjadi konflik ketenagakerjaan tersebut akan menyulut konflik lain dalam hubungan antar-negara. Oleh karena itu, penyelesaian secara diplomatis yang melibatkan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) sudah sesuai dengan pendekatan pertahanan keamanan negara.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan keamanan negara yang memperkuat institusi pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui penguatan sistem pertahanan dalam bentuk pemasangan jaringan internet di sepanjang wilayah perbatasan negara Indonesia. Informasi wilayah perbatasan negara yang akurat dapat diambil tindakan dengan tepat dan cepat oleh aparat pertahanan keamanan negara, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim antara lain dengan pembangunan pelabuhan di berbagai pulau di Indonesia dan memperkuat transportasi laut. Sedangkan dalam membangun kepolisian Republik Indonesia yang profesional dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Maskun dalam <https://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html>).

1. *Well Motivation*, seorang polisi harus memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya.
2. *Well Education*, seorang polisi harus memiliki jenjang pendidikan yang baik seperti, Diploma, Sarjana (S1), Pascasarjana (S2 dan S3).
3. *Well Salary*, seorang polisi harus digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung korupsi.
4. *Well Trained*, seorang polisi harus dibekali dengan pelatihan secara terus menerus melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab tantangan kepolisian yang aktual dan tantangan di masa depan.

5. *Well Equipments*, tersediannya sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi kepolisian serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik agar seorang polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

Profesionalisme POLRI akan berpadat pada terjaminnya keamanan masyarakat. Ketertiban masyarakat akan terjaga.

Pembangunan Industri pertahanan nasional tidak hanya berupa memproduksi senjata, tetapi beberapa peralatan perang yang sudah diakui dunia. Penggunaan teknologi informasi (TI) dan teknologi *cyber* seperti kecerdasan buatan (AI) atau *robotic, big data & analitic*, dan C4ISR (*Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance*) akan menjadi patner dari persenjataan utama seperti kapal, drone, pesawat, dan kendaraan tempur militer (<https://www.kompasiana.com/rakyatjelata/5e019326d541df59c0579f62/industri-pertahanan-indonesia-10-tahun-kedepan-seperti-apa?page=6>). Indonesia sejak 2015 telah mengembangkan drone MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) yang mampu menjalankan misi ISR penuh (intelligence, surveillance, reconnaissance). Drone ini mampu beroperasi selama 24 jam dengan ketinggian 15.000 kaki dan jangkauan jelajah 5.000 km. Spesifikasi drone ini serupa dengan milik drone CH-4 (China), Anka (Turki) dan Patroller (Safran-Perancis). Bila Pesawat tanpa awak ini diproduksi massal dengan spesifikasi militer dapat digunakan sebagai patroli udara untuk menutupi ruang udara dari sisi keamanan dan pertahanan. Pada sisi lain tahun 2013, PT PAL sudah resmi memperlihatkan desain *mockup* serta spesifikasi *helicopter carrier*. PT.PAL telah sukses membangun kapal bertonase besar, seperti LPD (*Landing Platform Dock*) dan kapal pengangkut barang (kargo) Star 50, yang dapat menjadi platform kapal induk helikopter.

Kemandirian industri pertahanan nasional sangat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pada satu sisi, industri pertahanan yang menggunakan teknologi moderen menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Ternyata, negara Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain dan punya daya saing dalam industri pertahanan negara. Pada sisi yang lain, akan mendorong generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan keamanan negara karena dapat menyalurkan bakat yang dimilikinya. Bukan hanya membanggakan dan minat belajar, industri pertahanan juga dapat menjadi alternatif bidang profesi yang menjanjikan di masa depan. Tentu yang lebih terjamin adalah perasaan aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, karena ke depan industri pertahanan tersebut melengkapi infrastruktur pertahanan keamanan negara di semua sudut wilayah Indonesia. Salah satu produk wahana laut adalah 14 Meter, Fast Patrol Boal-Aluminium di bawah ini.

FAST PATROL BOAT 15 METER, ALUMINIUM

PRINCIPAL DIMENSIONS
Dimensions :
 - Length Over All (LOA) : abt. 15.80 m
 - Length Water Line (Lwl) : abt. 13.76 m
 - Breadth moulded at midships (Bm) : abt. 3.20 m
 - Breadth moulded at transom (Bt) : abt. 3.10 m
 - Depth moulded at midships (D) : abt. 1.90 m
 - Draft at max. displacement (T) : abt. 0.75 m

Displacement
 The displacement with 100% at all consumable materials is about 14.2 tons.

Tank Capacity
 - Fuel Oil : abt. 2.10 tons
 - Fresh Water : abt. 0.60 tons

Speed & Endurance
 Maximum speed : abt. 35 knots
 Patrolling speed : abt. 20 knots
 Endurance : abt. 300 nm

Complement
 Pilot : 1 person
 crews : 4 persons
 Total complement : 5 persons

PROPULSION SYSTEM
Main Engine and Gear Box
 - Type : High speed, 4 stroke, In-line, single acting, turbo charged, non reversible, electric starting, fresh water cooling system.
 - No. of set 2 sets
 - Output power 570 hp
 - Revolutions 2300 rpm

Propeller System
 Type Surface Piercing Propeller & No. of set : 2 sets

Trim Flap
 Type : Electro Hydraulic
 No. of set : 2 (two) sets

RULES AND CLASSIFICATION
 GL Classification for High Speed Craft

TOWING MODEL TEST
 The vessel have been bare hull resistance and sea keeping test in Towing Model Test HSVA Germany

www.pal.co.id
 www.bumn.go.id/pal @ptpal_indonesia @ptpal_indonesia

Sumber: <https://pal.co.id>

Gambar 15.2
 14 Meter, Fast Patrol Boal-Aluminium buatan PT. PAL INDONESIA

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pertahanan keamanan negara dalam meminimalisasi dampak globalisasi antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk menganalisis dan pengambilan keputusan berbagai gelombang globalisasi untuk kepentingan masyarakat. Adapun peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan akan mempermudah perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Dalam kasus pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dapat dipelajari salah satu data sebagai berikut.

Masuk Zona Merah, Melalui Surat Terbuka, IMKS Minta Perhatian Bupati dan Gubernur Jatim

28 Maret 2020

SURABAYA, Sabtu (28/3/2020) suaraindonesia-news.com – Ikatan Mahasiswa Kangean Surabaya (IMKS), merupakan organisasi kedaerahan Mahasiswa Kepulauan Kangean yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Tinggi di Surabaya, berkirim surat terbuka untuk Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur.

Pasalnya, mereka mengaku resah dan bimbang dengan masuknya Kota Surabaya ke zona merah virus corona (Covid-19).

Berikut isi lengkap surat terbuka yang dikirim IMKS:

Kepada yang Terhormat:
Ibu Gubernur Jawa Timur
Bapak Bupati Sumenep

Assalamu'alaikum
Salam Sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Ibu Gubernur dan Bapak Bupati yang saya hormati, kami Ikatan Mahasiswa Kangean Surabaya, dari Kepulauan Kangean yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Tinggi di Surabaya yang hingga hari ini merupakan zona merah terkait penyebaran COVID-19.

Sudah beberapa hari ini Kami masih patuh dengan himbauan #dirumahaja untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi, kami juga dilanda keresahan yang sangat luar biasa. Sudah ada himbauan untuk tidak pulang kampung, namun sebagian besar kawan-kawan kami yang sudah pulang kampung dengan resiko bisa menjadi penyebar virus di pulau tercinta, (Kangean)

Kawan kami yang sudah pulang kampung dari zona merah pasti dengan berbagai pertimbangan dan keresahan yang luar biasa juga.

Keluarga yang membiayai kuliah dan hidup di rantau rata-rata adalah pekerja lepas yang sampai hari ini harus berhenti kerja karena ada himbauan tersebut. Bahkan, sebagian besar keluarga mereka menjadi TKI di Malaysia yang sampai saat ini melakukan LockDown.

Jika kami masih berdiam disini, sementara keluarga yang membiayai hidup kami selama ini tidak bekerja lantaran himbauan #dirumahaja, lalu nanti kami makan apa?

Jika kami yang di zona merah ini harus berdiam, saya mohon kepada Ibu Gubernur dan Bapak Bupati bisa memperhatikan biaya hidup kami selama disini. karena sudah pasti tidak akan ada kiriman dari keluarga yang sudah berhenti kerja. Jika memang kami harus pulang kampung, tolong Pastikan bahwa kami pulang dengan tidak membawa virus itu ke Pulau kecil dan membahayakan orang-orang tercinta disana.

Demikian surat ini, untuk di perhatikan

Terimakasih

Subhan Ma'ruf Ali

Ketua Umum IMKS Surabaya

Sumber: <https://suaraindonesia-news.com/masuk-zona-merah-melalui-surat-terbuka-imks-minta-perhatian-bupati-dan-gubernur-jatim/>

Dari contoh berita tersebut, beberapa data yang dapat ditangkap antara lain:

1. Kota Surabaya masuk zona merah pandemi Covid-19 yang menyebar di wilayah Indonesia.
2. Ikatan Mahasiswa Kangean Surabaya (IMKS) merupakan organisasi kedaerahan mahasiswa Kepulauan Kangean yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Tinggi di Surabaya.

3. Mahasiswa patuh dengan himbauan #dirumahaja untuk mencegah penyebaran Covid-19.
4. Mahasiswa dilanda keresahan karena ada himbauan untuk tidak pulang kampung,
5. Mahasiswa menyadari bila pulang kampung dengan resiko bisa menjadi penyebar virus di pulau tercinta, (Kangean).
6. Keluarga mahasiswa yang membiayai kuliah dan hidup di rantau rata-rata adalah pekerja lepas yang sampai hari ini harus berhenti kerja karena ada himbauan #dirumahaja.
7. Sebagian besar keluarga mahasiswa menjadi TKI di Malaysia yang sampai saat ini melakukan *LockDown*.
8. Mahasiswa mohon kepada Ibu Gubernur dan Bapak Bupati bisa memperhatikan biaya hidup.
9. Jika memang mahasiswa harus pulang kampung, tolong pastikan bahwa kami pulang dengan tidak membawa virus itu ke pulau kecil dan membahayakan orang-orang tercinta di Kangean.

Data dalam berita tersebut diperlukan analisis yang komprehensif, baik dari sisi hukum, sosial, data kependudukan, ekonomi, dan kesehatan. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sumenep dapat mempertimbangkan kajian keilmuan tersebut untuk memenuhi tuntutan surat pembaca agar pertahanan keamanan negara tetap terjaga.

C. Daerah yang Maju dan Aman untuk Memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang politik di daerah akan memiliki makna yang positif bila memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk-bentuk pengaruh tersebut antara lain:

1. Terbentuknya partai yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat, baik partai politik nasional maupun partai politik lokal sebagai akibat dari menguatnya arus demokratisasi politik. Contoh partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh. Partai politik, baik partai politik nasional maupun partai politik lokal, berkewajiban membangun negara dan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera.
2. Kebebasan berpendapat di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial yang dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyampaikan pendapat harus menghindari hal-hal

yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

3. Partisipasi sipil meningkat dan masyarakat dapat menyampaikan pendapat, usulan, dan kritik dalam menyuarkan hak politiknya secara konstruktif. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.
4. Masyarakat politik tumbuh subur yang antara lain ditandai dengan menghindari praktik politik uang, serta menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik uang adalah praktik jual beli suara dalam bentuk pemberian uang tunai, hadiah, sembako dan lain-lain yang biasanya diberikan pada waktu musim pemilihan umum (Muhtadi dalam Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No. 1, Juni 2013). Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
5. Penerapan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab untuk mempercepat layanan kesejahteraan masyarakat. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

6. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan antara lain dengan *e-government*, yaitu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu: (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
7. Kampanye perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin marak. Kesadaran HAM di daerah berkembang dengan baik. Bentuk yang paling nyata adalah perlakuan orang tua terhadap anak secara bertanggung jawab. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang politik di daerah yang antara lain dengan menerapkan beberapa tindakan di atas diharapkan akan memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Harapan tersebut akan dapat dipenuhi apabila kekuatan politik yang ada, baik suprastruktur politik di daerah dan infrastruktur politik yang mendukungnya berjalan secara sinergi dalam dinamika yang harmonis. Suprastruktur politik di daerah sebagai pelaksana pemerintahan dan pengendali kebijakan pemerintahan. Sedangkan infrastruktur politik yang mendukungnya akan memberikan pendapat, usulan dan kritik pada pelaksanaan pemerintahan melalui saluran politik yang tersedia secara bertanggung jawab.

Dalam dimensi yang lain, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan keamanan negara di daerah akan menjamin rasa aman masyarakat. Bentuk-bentuk jaminan pertahanan keamanan negara di daerah antara lain:

1. Daerah dapat memanfaatkan analisis yang akurat terhadap situasi global melalui studi ilmiah sehingga pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif menguntungkan bangsa Indonesia. Misalnya daerah dapat mendukung kemandirian pangan untuk mengurangi impor komoditas pangan dari luar negeri. Termasuk di dalamnya, daerah dapat mencegah *illegal fishing* dan meningkatkan profesionalisme nelayan dengan penggunaan teknologi perikanan yang mederen.

2. Daerah dapat memanfaatkan peningkatan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain, misalnya tentang persyaratan kompetensi TKI dapat disiapkan oleh daerah.
3. Daerah berpartisipasi dalam penguatan sistem pertahanan, Misalnya daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan dapat menjadi pintu gerbang yang cantik bagi negara lain memasuki wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan pertahanan keamanan negara.
4. Daerah dapat terlibat dalam memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim. Daerah dapat membangun pelabuhan-pelabuhan terstandar sehingga ekspor komoditas daerah dapat dilakukan secara efisien. Di samping itu, daerah dapat memberikan beasiswa kepada putra-putrinya untuk dididik pada sekolah tinggi pelayaran atau kelautan.
5. Daerah bersama dengan POLRI mendukung pembangunan kepolisian Republik Indonesia yang profesional, misalnya dengan cara menekan angka kriminalitas. Dapat juga melakukan peningkatan ketertiban masyarakat dengan menetapkan peraturan daerah yang mengedepankan pertahanan keamanan negara.
6. Daerah dapat mendukung kemajuan industri pertahanan dengan memanfaatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan daerah, misalnya kapal patroli laut dengan dukungan negara.
7. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pertahanan keamanan negara dilakukan dengan meminimalisasi dampak globalisasi. Seperti dalam kasus pandemi Covid-19, daerah dapat mempersiapkan warganya untuk patuh pada protokol kesehatan.
8. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan menjadi kewajiban daerah untuk melakukan pembaharuan secara terus-menerus. Data kependudukan yang akurat, seperti dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) akan sangat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan.

Bidang pertahanan keamanan negara, kewenangan utamanya pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah. Namun demikian, daerah tidak berarti tidak dapat berpartisipasi memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan keamanan negara. Daerah sebagai satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karakteristik dan potensi daerah menjadi salah satu penentu pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan keamanan negara.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang politik dan pertahanan keamanan negara akan membawa daerah yang maju dan aman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Artinya selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam bidang politik, keterbukaan bukan berarti dibolehkan untuk menyampaikan informasi ke publik yang berisi kebohongan. Berita *hoax* harus dihindari. *Hoax* merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi (Juditha dalam Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, April 2018). Hoak dapat ditangkal apabila seseorang atau masyarakat memiliki kemampuan literasi media yang tinggi. Juliswara (Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 4, No. 2, Agustus 2017) menyatakan, bahwa kemampuan literasi media yang tinggi ditandai oleh:

1. daya kritis dalam menerima dan memaknai pesan,
2. kemampuan untuk mencari dan memverifikasi pesan,
3. kemampuan untuk menganalisis pesan dalam sebuah diskursus,
4. memahami logika penciptaan realitas oleh media, dan
5. kemampuan untuk mengkonstruksi pesan positif dan mendistribusikannya kepada pihak lain.

Sementara demokratisasi sebagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang politik yang lainnya, tidak boleh memaksakan kehendak dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan politik. Kasus politik uang dalam paparan di atas harus dihindari.

Pada hal yang lain, dalam bidang pertahanan keamanan negara, daerah tetap mewaspadaai gelombang globalisasi. Pergerakan orang dan barang antar-negara dapat mempengaruhi gaya hidup. Apabila gaya hidup tersebut tidak sesuai dengan tata nilai bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika harus disingkirkan. Misalnya gaya hidup yang penuh kebebasan dalam arti liberalisme, yang mementingkan diri sendiri, hedonisme, yang mengutamakan kesenangan yang bersifat hura-hura, atau pun bentuk fanatisme sempit harus dihindari. Dengan demikian sumbangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertahanan keamanan negara akan bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

PENUGASAN 1

□ Tujuan

Membuat laporan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel.

□ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

□ Langkah-langkah

1. Anda lakukan pengamatan terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara.
2. Tuliskan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, *Whats App*, atau *e-mail*.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

Uraian Materi

A. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang ekonomi dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019 diarahkan dalam bentuk pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pembangunan transportasi umum masal perkotaan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan investasi, mendorong BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi agen pembangunan, peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan kapasitas perdagangan nasional, peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi, peningkatan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, penguatan sektor keuangan, penguatan kapasitas fiskal negara. Dalam modul ini akan dibatasi beberapa contoh saja. Pembahasan lainnya dapat menjadi bahan pengembangan dalam pembelajaran bagi Warga Belajar di kemudian hari. Dari contoh pembahasan tersebut diharapkan Warga Belajar dapat mengidentifikasi data yang disajikan dalam pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang ekonomi

Dalam konteks pembangunan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan misalnya. Hal ini sangat berdampak pada kondisi dan perubahan perilaku ekonomi di daerah. Kita akan membahasnya dalam pembangunan jalan tol sepanjang Pulau Jawa. **Jalan Tol** adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol (<http://bpjt.pu.go.id/>). Dalam pandangan pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tujuan dan manfaat penyelenggaraan jalan tol (<http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>) sebagai berikut.

Tujuan penyelenggaraan jalan tol:

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.
2. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.
4. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

Manfaat penyelenggaraan jalan tol:

1. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi.
2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang.
3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non-tol.
4. Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol.

Apa yang dirancang pemerintah tentang kemanfaatan jalan tol, juga diakui oleh pendapat Sumaryoto (dalam *Journal of Rural and Development*, Volume I, No. 2 Agustus 2010), bahwa jalan tol semakin memudahkan akses transportasi antar-daerah, sehingga aktivitas bisnis berjalan dengan lancar. Dampak keuntungan ikutannya adalah terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi rakyat. Jalan tol memicu pertumbuhan kawasan, khususnya pembangunan perumahan baru. Dari sekitar 500 kawasan hunian di kawasan Jabodetabek, 10% di antaranya dibangun dekat atau terintegrasi dengan akses jalan tol. Ini membuktikan bahwa akses tol mampu mendongkrak nilai jual properti. Namun Sumaryoto juga tidak memungkiri adanya dampak negatif keberadaan jalan tol, seperti penggunaan lahan yang sangat luas dan secara langsung akan berdampak pada tata ruang lahan pertanian secara keseluruhan di pulau Jawa. Jalan panjang yang membelah pulau Jawa selain akan memangkas luas lahan pertanian juga akan memotong alur sungai, saluran irigasi, dan mengubah alur distribusi sarana kebutuhan pertanian maupun pemasaran produk pertanian. Jalan tol juga akan membuka kawasan pemukiman dan industri baru yang secara langsung juga akan mengurangi luas lahan pertanian. Jalan tol trans-Jawa akan mengonversi 655.400 hektar lahan pertanian. Hal ini jelas akan mengancam ketahanan pangan nasional, mengingat peran Pulau Jawa memasok 53 persen kebutuhan pangan nasional.

Dalam persoalan pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dapat dipelajari apa yang dicatat dalam berita di bawah ini.

7 Bulan Tol Cipali, 5 Restoran Besar di Jalur Pantura Lama Bangkrut

Kompas.com - 08/01/2016

INDRAMAYU, KOMPAS.com – Kehadiran Tol Cipali membuat restoran di sepanjang jalur Pantura Lama terpuruk. Bahkan, lima restoran besar tutup.

“Hanya dalam tujuh bulan, lima rumah makan dan restoran tutup. Ini bisa terjadi pada restoran lainnya di sana,” ujar Kepala Bidang Pendapatan I Dinas Keuangan Daerah Indramayu, Teten Machmud. Hal itu diungkapkan Teten usai rapat kerja bersama Komisi C DPRD Indramayu, Jumat (8/1/2016).

Penurunan pendapatan rumah makan dan restoran akibat beroperasinya Tol Cipali bisa dilihat dari penurunan pajak. Untuk delapan wajib pajak saja, penurunannya signifikan, dari Rp 300 jutaan menjadi Rp 61 juta per bulan.

“Misalnya, pajak Rumah Makan Pesona Laut. Sebelum Tol Cipali dibuka pajaknya Rp 20 juta per bulan, namun sekarang hanya Rp 9 juta,” imbuhnya.

Untuk menanggulangi persoalan ini, pihaknya berupaya untuk mengalihkan pendapatan pajak dari Pantura lama ke rest area. Dia berharap, pendapatan pajak restoran dan rumah makan di Pantura Lama bisa dioptimalkan.

“Rumah makan yang tutup ini juga kemungkinan akan pindah ke daerah selatan. Karena lokasi yang sekarang sudah tidak menguntungkan. Sepi tak ada pengunjung,” ucap dia.

Berbeda dengan restoran, pajak dari catering makanan dan minuman mengalami peningkatan. Itulah mengapa, meski sektor restoran terpukul, namun pendapatan pajaknya tetap mencapai target di angka Rp2,621 miliar dari nilai anggaran Rp1,85 miliar.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Indramayu, M Alam Sukmajaya mengatakan, setiap hari ia melintasi Pantura Lama. Jika dulu rumah makan di sepanjang jalur itu, seperti Pesona Laut penuh dengan kendaraan, kini sepi. Paling hanya satu dua mobil yang terparkir di sana. Dia lantas meminta dinas untuk membuat laporan lebih detail tentang dampak Tol Cipali dan segera bergerak agar dampak buruknya tidak semakin besar.

Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2016/01/08/12494361/7.Bulan.Tol>.

Cipali.5.Restoran.Besar.di.Jalur.Pantura.Lama.Bangkrut.

Penulis : Kontributor Bandung, Reni Susanti

Dalam berita tersebut pengaruh kemajuan dengan pembangunan jalan tol trans-Jawa yang menimpa lima restoran di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kerugian ekonomi sebagai pendapatan rumah makan, juga berpengaruh pada berkurangnya pajak rumah makan dari Rp 300 jutaan menjadi Rp 61 juta per bulan yang masuk ke kas daerah Kabupaten Indramayu. Alternatif yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mendongkrak kembali pajak rumah makan dengan adanya jalan tol antara lain penerapan pajak rumah makan di *rest area* dan pajak catering.

Pembangunan jalan tol merupakan hasil perencanaan pembangunan jangka panjang yang sudah dikaji berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi jangka panjang tersebut secara nasional mempermudah transportasi antar-daerah, yang secara sosial juga akan mendekatkan pola interaksi antar-anggota masyarakat dalam memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya yang bersifat positif, tetapi muncul efek negatif. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, efek negatif hasil pembangunan, dalam hal ini pembangunan jalan tol, akan menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang. Itulah salah satu fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mendorong temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi peradaban manusia.

Pembangunan bidang ekonomi yang lain, seperti pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Untuk menjaga sumber daya hayati negara mengaturnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebagai warga negara Indonesia wajib ikut menjaga sumber daya hayati yaitu dengan menjaga tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk konservasi untuk tumbuhan dapat dilakukan juga dengan teknologi kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik untuk membudidayakan atau menumbuhkan tanaman dengan cara mengisolasi eksplan seperti sel, jaringan, organ maupun protoplas yang kemudian diinduksi dalam kondisi aseptik secara *in vitro* agar dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman dengan organ yang lengkap (Dewanti, 2018: 1).



Sumber: <https://8villages.com/>

Gambar 15.2 Pembibitan Kelapa Kopyor

Pada awalnya teknik kultur jaringan digunakan untuk memperoleh bibit tanaman dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Sekarang sudah berkembang sehingga teknik ini digunakan untuk mencapai banyak tujuan misalnya untuk menghasilkan tanaman unggul dan tujuan komersial. Salah satu komoditas pertanian yang menggunakan teknik kultur jaringan adalah budidaya kelapa kopyor. Hal itu dilakukan dengan mengkultur embrio dengan tehnik 'mini growth chamber' yaitu menginduksi akar dan mengadaptasikan benih kelapa kopyor hasil kultur jaringan secara langsung. Tingkat keberhasilannya mencapai 90% dengan metode *ex-vitro rooting*' (<https://www.mongabay.co.id/2019/06/07/ternyata-kelapa-bisa-dibuat-kopyor-semua-dalam-satu-pohon-bagaimana-caranya>). Permintaan akan kelapa sebagai bahan minuman segar masih sangatlah tinggi. Hampir semua restoran dan tempat rekreasi menyajikan minuman dari bahan kelapa ini, apalagi jenis kelapa kopyor yang sudah pasti digemari oleh banyak kalangan. Harga kelapa kopyor sendiri saat ini bisa mencapai Rp 25.000-30.000/butir dari petani, yang dimana harga jual ini memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada harga kelapa biasa. Dengan harga jual yang demikian, sudah bisa dibayangkan betapa besar keuntungan yang bisa diperoleh petani (<https://8villages.com/full/petani/article/id/5c4530bf9b48d7ca64e5adee>). Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelapa kopyor, masyarakat dapat menikmati beberapa keuntungan tersebut. Daerah-daerah potensial tanaman kelapa dapat mengambil peran

untuk mensejahterakan rakyatnya. Keuntungan ekonomi semacam itu akan meningkatkan bentuk kesejahteraan masyarakat sebagai bangsa secara keseluruhan dalam semangat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Contoh lain tentang pengaruh kemajuan bidang ekonomi dalam konteks daerah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah penggunaan uang non-tunai atau uang elektronik (*e-money*). Pengertian *e-money* menurut Bank Indonesia (2006: 8) adalah:

1. Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money*, atau sering disebut dengan *stored value*, yang akan berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.
2. Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
3. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (*point of sale*), tanpa harus *on-line* ke komputer penerbit.

Alat pembayaran non-tunai yang cukup familiar dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu debit dan kartu kredit (Bank Indonesia, 2006: 12). Hal ini ditunjang dengan fungsi dari alat pembayaran tersebut yang selain untuk tarik tunai dan belanja juga dapat digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran. Faktor yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran non-tunai antara lain faktor keamanan, kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Dalam penggunaan pembayaran non-tunai, Bank Indonesia (2006: 37-38) mengingatkan hal-hal sebagai berikut.

1. Prosedur dan tata cara penggunaan *e-money*, fasilitas dan risiko yang mungkin muncul pada penggunaan *e-money*.
2. *Fee* dan biaya yang dikenakan kepada pemegang *e-money* dan *merchants*.
3. Tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal terjadi kerugian, misalnya akibat kegagalan operasional, *fraud*, *counterfeiting*, pencurian dan kehilangan.
4. Besarnya nominal *stored value* yang dikelola oleh penerbit yang memiliki perlindungan seperti pengelolaan oleh *trust agency*.
5. Resolusi bila terjadi *dispute* (mekanisme, rules dan prosedur).
6. *Replacement policy* bila terjadi kehilangan, pencurian atau *malfunction*.
7. Hak pemegang *e-money* untuk memperoleh *refund* atas *electronic value* yang belum digunakan.
8. Klausula mengenai validitas dan tanggal kadaluarsa (antara lain, periode penagihan, penerimaan pendapatan untuk kartu kadaluarsa yang tidak ditagihkan).

9. Tata cara pengajuan pengaduan terkait penggunaan *e-money* dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

Masyarakat di daerah sudah familiar dengan penggunaan uang non-tunai. Jaringan uang non-tunai di daerah berdampak pada perilaku masyarakat yang berkecenderungan menabung di bank. Hal yang demikian secara nasional akan berpengaruh pada perputaran uang untuk pembiayaan pembangunan nasional.

B. Data Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang sosial budaya dalam RPJM Nasional tahun 2015-2019 diarahkan dalam bentuk peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar-wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia, penanggulangan kemiskinan, peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pembangunan pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, pembangunan kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat, peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan. Banyaknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang sosial budaya, pembahasan dalam modul ini dibatasi pada hal-hal tertentu saja. Sebab masalah sosial budaya pada hakikatnya berhimpitan antara masalah yang satu dengan lainnya.

Misalnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan kemiskinan, bisa saja terjadi berhubungan dengan pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Karena miskin maka ikut bekerja dalam penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar, atau berlaku sebaliknya. Karena miskin maka melarikan diri dalam penyalahgunaan narkoba atau sebaliknya. Karena miskin maka memerlukan perlindungan anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Kenyataan ini memperoleh penjelasannya dari Prawoto (dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2009) sebagai berikut.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Adapun indikator keluarga miskin menurut BAPPENAS (2010: 14-15) adalah:

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar, baik bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dan puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi Kepala Keluarga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit.
15. Jenis atap bangunan tempat tinggal terlalu luas adalah sirap, genteng/seng/asbes kondisi jelek/kualitas rendah atau ijuk, rumbia.
16. Sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang sosial budaya dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah berusaha terus-menerus menanggulangi kemiskinan. Dalam catatan BAPPENAS telah dilakukan beberapa

strategi penanggulangan kemiskinan, seperti *pro poor growth*, terpadu, lintas sektor, dan berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi daerah yang berbasis komunitas dan sumber daya lokal (BAPPENAS, 2018: 49-60). Strategi kebijakan *pro poor growth* di antaranya: 1) bersifat padat karya; 2) menysasar wilayah dan sektor pekerjaan dengan konsentrasi penduduk miskin paling banyak (di wilayah perdesaan dan sektor pertanian); 3) mampu menciptakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan untuk penduduk miskin secara berkelanjutan; dan 4) mengurangi ketimpangan pendapatan. Kebijakan ini akan berpengaruh terhadap pendapatan penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Pengembangan sektor pendidikan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menekankan pada keterampilan, misalnya pendidikan vokasi melalui sekolah kejuruan dan Politeknik (BAPPENAS, 2018: 51). Peningkatan kualitas pendidikan ini penting untuk memperluas wawasan dan merubah pola pikir penduduk di KTI yang umumnya masih tertutup dan berpegang teguh pada adat-istiadat dan budaya setempat. Hal ini seringkali membelenggu masyarakat sehingga menyebabkan sulit berpikir maju dan produktif. Program pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan adat yang lebih disegani dibandingkan dengan aparat pemerintah karena terdapat kecenderungan pemimpin informal lebih didengar daripada pemimpin formal.

Data pendidikan yang lain terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi

Provinsi	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	20.50	23.31	30.56	40.47	46.77
Sumatera Utara	22.09	25.99	35.11	43.65	51.78
Sumatera Barat	29.03	32.53	38.03	47.49	52.85
Riau	28.49	32.33	39.78	49.45	55.37
Jambi	24.51	27.03	32.80	43.42	50.83
Sumatera Selatan	21.80	25.20	32.03	41.33	46.50
Bengkulu	24.24	26.34	32.90	40.42	48.70
Lampung	16.27	20.87	28.36	40.23	48.37
Kep. Bangka Belitung	24.86	28.70	35.31	45.45	54.93

Provinsi	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kep. Riau	43.42	50.10	58.87	65.60	77.18
DKI Jakarta	53.25	58.40	71.39	77.14	85.17
Jawa Barat	29.98	34.84	46.09	55.91	65.37
Jawa Tengah	24.54	29.89	38.75	48.63	58.75
DI Yogyakarta	43.16	49.23	57.37	68.82	75.04
Jawa Timur	24.61	29.59	38.76	48.07	57.23
Banten	31.48	37.01	45.49	57.86	66.96
Bali	34.81	41.78	48.33	57.71	65.48
Nusa Tenggara Barat	18.26	23.71	30.04	37.11	47.85
Nusa Tenggara Timur	14.63	18.92	25.30	29.65	36.33
Kalimantan Barat	20.23	24.66	30.38	38.92	47.04
Kalimantan Tengah	24.03	28.52	35.43	43.17	54.54
Kalimantan Selatan	27.92	32.61	37.37	49.32	57.82
Kalimantan Timur	37.49	46.11	50.56	60.85	69.44
Kalimantan Utara	30.88	38.50	45.68	58.42	65.36
Sulawesi Utara	30.16	37.20	44.70	51.22	57.48
Sulawesi Tengah	20.24	22.99	31.70	37.02	44.13
Sulawesi Selatan	27.47	31.37	38.74	47.07	54.85
Sulawesi Tenggara	23.02	28.27	35.14	43.94	53.36
Gorontalo	23.06	27.30	34.39	42.71	50.62
Sulawesi Barat	16.60	20.86	26.24	33.95	40.95
Maluku	22.11	27.55	31.55	39.20	44.02
Maluku Utara	15.37	19.21	25.10	34.24	38.11
Papua Barat	22.95	26.08	34.68	45.41	52.37
Papua	11.43	15.00	21.29	24.23	26.45
INDONESIA	27.04	31.83	40.48	49.73	58.22

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Tunjukkan tiga provinsi teratas untuk orang Indonesia berusia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK). Apa maknanya? Ketiga provinsi

tersebut dapat diindikasikan telah terbiasa menggunakan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menulis dan menyimpan data, mencari data, atau untuk mengirim data. Dapat diindikasikan juga, bahwa warga dari ketiga provinsi tersebut suka membaca dan belajar, sehingga informasi baru merupakan kebutuhan dalam hidupnya. Bagaimana penggunaan TIK di provinsi daerah Warga Belajar?

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang sosial budaya yang lain lagi adalah pemberdayaan perempuan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara (2018: 25-26) dalam hal pemberdayaan perempuan menyebutkan, bahwa:

1. Perempuan yang bekerja di sektor jasa lebih tinggi dibanding laki-laki. Sedangkan perempuan yang bekerja di sektor pertanian dan industri lebih rendah daripada laki-laki.
2. Dari 100 penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 40 orang diantaranya bekerja di sektor pertanian, 10 orang di industri dan 50 orang di jasa.
3. Dari 100 penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 49 orang di antaranya bekerja di sektor pertanian, 16 orang di industri dan 35 orang di jasa.

Dari data mengarahkan pembuat kebijakan di Provinsi Maluku Utara apabila akan meningkatkan pemberdayaan perempuan, maka perlu dilatih keterampilan yang berhubungan dengan sektor jasa. Kebijakan tersebut logis, karena sektor jasa yang paling banyak digeluti pekerjaannya oleh perempuan.

C. Daerah yang Mandiri dan Rukun untuk Memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika

Kemandirian dalam bidang ekonomi dan kerukunan yang diharapkan saling menopang secara sosial budaya dalam masyarakat Indonesia benar-benar dilaksanakan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemandirian dalam bidang ekonomi dibangun setahap demi setahap untuk mensejahterakan rakyat. Tiga pilar utama ekonomi harus bergerak serasi dan seimbang. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pendorong dan penyeimbang kekuatan ekonomi swasta dan koperasi. Perusahaan swasta diberi peran yang luas untuk menampung tenaga kerja dan modernisasi teknologi. Koperasi yang berasal dari kekuatan masyarakat mestilah ambil bagian dalam pemerataan kesempatan. Ketiga pilar ekonomi hendaklah mengakar juga sampai ke daerah-daerah, sehingga masyarakat di mana pun wilayah Indonesia menikmati kesejahteraan. Ego daerah juga harus dihindari, sebab kesejahteraan daerah satu hendaklah melimpah bagi daerah lainnya. Apabila hal ini tidak bisa dijaga, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi migrasi besar-besaran dari wilayah yang berpenghasilan rendah ke wilayah yang berpenghasilan tinggi. Ketimpangan pembangunan ekonomi yang demikian tidak dikehendaki oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Kemandirian ekonomi melalui koperasi dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah Indonesia. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian). Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Namun keberadaan koperasi dari waktu ke waktu belum menunjukkan hal yang menggembirakan. Dalam catatan Siregar (dalam VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika 5 (1). 2020), bahwa jumlah koperasi tidak aktif semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah koperasi. Koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Jumlah anggota semakin berkurang. Serapan tenaga kerja belum mampu dimaksimalkan karena keterbatasan koperasi baik secara finansial maupun kesiapan organisasi.

Peran BUMN yang mendukung kemandirian ekonomi ditempuh melalui tujuan-tujuan (Mansoer dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/40079/22574>) sebagai berikut.

1. Efisiensi ekonomi, yang meliputi efisiensi alokatif atau ekonomis, efisiensi teknologi, dan efisiensi marjinal. Efisiensi alokatif merupakan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Efisiensi teknologi adalah hubungan antara *output* dengan *input* pada proses produksi, dengan tingkat teknologi tertentu. Efisiensi marjinal dalam arti statis adalah kemampuan manajemen mengadakan penghematan dan dalam arti dinamis adalah kemampuan manajemen untuk memanfaatkan teknologi baru dan kesempatan pasar.
2. Kenaikan kemampuan memperoleh laba. Kemampuan BUMN memperoleh laba menjadi penting, karena selain merupakan sumber dana interen perusahaan, laba juga merupakan sumber pendapatan negara berupa pajak dan bagian laba yang diterima oleh pemerintah sebagai pemilik.
3. Pemerataan distribusi pendapatan. BUMN merupakan alat pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan melalui kebijakan harga, dengan menjual pada harga yang lebih rendah daripada biaya, atau dengan melalui keputusan investasi yang mengabaikan "skala ekonomis", untuk meningkatkan pendapatan riil golongan tertentu.
4. Tujuan bersifat makro. BUMN sebagai alat campur tangan pemerintah mempunyai tujuan mendorong dan menciptakan kesempatan kerja, memelihara keseimbangan neraca pembayaran internasional, mencegah inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jadi BUMN ada karena alasan risiko, pemerataan, historis, politis, dan pragmatis. Alasan risiko dan kemampuan manajerial merupakan sebab adanya BUMN karena sektor swasta dianggap tidak bisa melaksanakan. Alasan pemerataan karena pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya yang lemah dan miskin, alasan historis karena warisan lama, dan alasan politis karena menyangkut sektor strategis dan kemungkinan adanya tekanan kepentingan dari kelompok politik yang kuat. Sedangkan alasan pragmatis didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat ekonomis campur tangan pemerintah di bidang ekonomi berupa BUMN.

Kemudian, bagaimana peran swasta? Diadopsi dari Soedjito (dalam Jurnal Studi Pembangunan, Vol . I, No. I, Januari 1998), bahwa swasta diikutkan dalam pembangunan ekonomi karena ada beberapa keuntungan, antara lain:

1. Sektor pemerintah seringkali kekurangan sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan.
2. Perusahaan-perusahaan swasta biasanya dijalankan dan dikelola lebih baik dan lebih efisien daripada BUMN.
3. Partisipasi swasta membantu menyaring proyek pembangunan yang tidak jelas kelayakan ekonominya.
4. Menciptakan model kompetitif dalam pembangunan.

Namun perlu mendapat perhatian juga beberapa kelemahan keikutsertaan swasta dalam pembiayaan ekonomi, karena:

1. Apabila muncul monopoli akan menimbulkan regulasi yang rumit.
2. Perlu diperhitungkan faktor lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Adanya kecenderungan mencari untung secara berlebihan.

Oleh karena itu perlu pengaturan secara regulatif keterlibatan swasta dalam pembiayaan pembangunan ekonomi secara tegas dalam bentuk:

1. Menghilangkan distorsi harga dan menciptakan proses yang kompetitif.
2. Menerapkan kerangka peraturan perundang-undangan yang tegas.
3. Mengelola risiko secara efisien dan adil.
4. Menerapkan proses kontrak yang transparan dan kompetitif.
5. Merancang proses pengambilan putusan publik yang lebih cepat dan tepat.
6. Menghadapi isu sosial secara terbuka dan lebih dini.

Dengan regulasi yang demikian diharapkan pengaruh keterlibatan swasta dalam pembangunan ekonomi tetap bertumpu pada kepentingan nasional yang berbhinneka tunggal ika.

Sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial budaya akan menciptakan kehidupan yang rukun dalam masyarakat. Hidup rukun adalah modal untuk mencapai masyarakat yang bergotong-royong, atau dengan kata lain masyarakat yang menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam masyarakat yang bergotong-royong, kemiskinan dirasakan sebagai tanggung jawab bersama. Dasarnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Koentjaraningrat yang dikutip oleh Rostiyati (dalam Patanjala, Vol. 4, No. 1, Maret 2012) mendefinisikan gotong royong sebagai salah satu unsur (aktivitas) dalam organisasi sosial yang merupakan suatu konsep atau nilai kebersamaan (kerja sama) dan merupakan sifat positif dalam mentalitas masyarakat. Gotong royong merupakan cerminan dari manusia yang merupakan makhluk hidup sosial tidak bisa hidup sendiri, karena dikelilingi oleh sistem sosial dan komunitas yang selalu terikat.

Kehidupan masyarakat yang rukun, bergotong-royong akan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan demikian secara sosial budaya pengaruhnya berdampak pada menguatnya semangat Bhinneka Tunggal Ika.

PENUGASAN 2

❑ Tujuan

Membuat laporan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Anda tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel.

❑ Media

Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

❑ Langkah-langkah

1. Anda lakukan pengamatan terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Anda tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya.
2. Tuliskan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Anda tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, *Whats App*, atau *e-mail*.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

Latihan Soal

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Bila ada data hasil wawancara menyatakan, "Di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, praktik politik uang rawan terjadi dalam Pilkada 2020 kalau dilaksanakan". Penyebabnya adalah
 - A. banyak terjadi pemutusan hubungan kerja
 - B. kemauan calon untuk memenangi Plkada
 - C. kesulitan warga memperoleh penghasilan
 - D. dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi

2. Agar penyebaran berita bohong dapat dihindari karena merugikan banyak pihak, maka ketika akan berbagai informasi yang harus dilakukan adalah
 - A. memeriksa kembali atas data dan sumber data
 - B. secepatnya mengirim informasi agar cepat sampai
 - C. menyerahkan manfaatnya pada penerima informasi
 - D. pengecekan ulang kapan informasi itu diterima
3. Tidak hanya orang dewasa yang memiliki hak politik, anak-anak juga dijamin hal politiknya dalam bentuk
 - A. berbakti pada orang tua
 - B. kecukupan makan minum
 - C. kesempatan baca buku
 - D. bekerja dengan tekun
4. Dalam upaya pertahanan keamanan negara, tiap daerah dapat menentukan kriteria TKI yang
 - A. belum memiliki pekerjaan tetap di daerah
 - B. sanggup kontrak kerja dalam waktu lama
 - C. mendapatkan pelatihan kerja sebelumnya
 - D. perjanjian kerjanya saling menguntungkan
5. Pengaruh globalisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari secara nasional juga di daerah, maka ketika menghadapi gelombang produk luar negeri kita dapat melakukan
 - A. tidak membeli produk asing apa pun bentuknya
 - B. menyeleksi sesuai fungsi dan manfaat produk
 - C. meniru produk untuk penciptaan peluang kerja
 - D. merasa terbantu karena murah dan berkualitas
6. Jumlah pelaku tindak pidana kelompok umur anak-anak di Kabupaten Karangasem tercatat paling banyak (32 orang), diikuti Kota Denpasar (30 orang) dan Kabupaten Tabanan (21 orang). Kabupaten Badung tercatat sebagai daerah dengan jumlah pelaku tindak pidana anak-anak paling sedikit yaitu 3 orang, diikuti Kabupaten Gianyar (11 orang) dan Kabupaten Bangli (10 orang) (Statistik Kriminal Provinsi Bali Tahun 2017). Oleh karena itu, program sosialisasi penegakan hukum akan diprioritaskan di

- A. Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem
 - B. Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan
 - C. Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar
 - D. Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli
7. Pembangunan jalan tol Trans Jawa memberikan keuntungan secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam hal
- A. biaya transportasi yang murah
 - B. menghemat waktu tempuh
 - C. makin banyak barang terangkut
 - D. melintasi banyak wilayah
8. Dari 100 penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 49 orang di antaranya bekerja di sektor pertanian, 16 orang di industri dan 35 orang di jasa, maka pelatihan teknologi dalam masyarakat tersebut yang paling banyak diperlukan adalah
- A. pengelolaan limbah rumah tangga berbasis komunitas
 - B. manajemen pengembangan kerajinan rumah tangga
 - C. usaha perbengkelan motor dan mesin yang moderen
 - D. pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman cabai
9. Strategi kebijakan *pro poor growth* dalam pengentasan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk
- A. rekrutmen calon aparatur sipil negara secara masif
 - B. padat karya untuk memperbaiki fasilitas jalan desa
 - C. membangun pusat ekonomi untuk menarik investor
 - D. kerja bakti secara masal untuk membangun solidaritas
10. Persentase yang tinggi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi suatu daerah memberikan indikasi, bahwa masyarakat di wilayah tersebut
- A. suka bekerja keras untuk mencukupi keperluan hidupnya
 - B. bekerja secara efektif dan efisien dalam mengolah data
 - C. pekerjaan dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunda
 - D. suka bersaing dengan kemajuan daerah atau negara lain

B. Soal Uraian

Isilah kolom data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahmu dan berikan komentar untuk mempersatukan Indonesia sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Bidang Pembangunan	Data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Komentar untuk mempersatukan Indonesia sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika
Bidang Politik	1.	1.
	2.	2.
Bidang Pertahanan Keamanan Negara	3.	3.
	4.	4.
Bidang Ekono	5.	5.
	6.	6.
	7.	7.
Bidang Sosial Budaya	8.	8.
	9.	9.
	10	10

RANGKUMAN

Data adalah sekumpulan informasi hasil pencatatan atas suatu kejadian. Data sebagai hal-hal yang diketahui sebagai fakta dan gambar sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan. Jenis data dibedakan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Berbagai contoh data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sesuai bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks daerah terdiri atas bidang politik, bidang pertahanan keamanan negara, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Tujuan dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera secara dinamis, serta harmonis antar-wilayah di Indonesia.

KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN

Unit 1

Rubrik Penilaian Penugasan 1

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan tentang identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel dibuat dengan uraian jelas.				
3	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
4	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel disajikan secara logis.				
2	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang politik atau bidang pertahanan keamanan negara dengan menggunakan tabel disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Unit 2

Rubrik Penilaian Penugasan 2

❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan tentang identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel di kertas folio, <i>Whats App</i> , atau <i>e-mail</i> , seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau <i>Whats App</i> atau <i>e-mail</i> .

❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel dibuat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel dibuat dengan uraian jelas.				

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
3	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel dibuat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel dibuat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel disajikan secara logis.				
2	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
4	Tulisan identifikasi data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi desa/kelurahan di tempat tinggal Warga Belajar tentang data pembangunan bidang ekonomi atau bidang sosial budaya dengan menggunakan tabel disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila sketsa sangat memadai,
- 3 : bila sketsa memadai,
- 2 : bila sketsa kurang memadai,
- 1 : bila sketsa tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

KUNCI JAWABAN

A. Soal Pilihan Ganda

1. C
2. A
3. C
4. D
5. B
6. A
7. B
8. D
9. B
10. B

Keterangan:

- Jawaban benar diberi skor 1.
- Jawaban salah diberi skor 0.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

B. Soal Uraian

Kunci jawaban merupakan contoh-contoh data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sesuai bidang pembangunan dan komentar mengarah pada persatuan Indonesia sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rubrik penilaian masing-masing data yang benar diberi skor 1 dan komentar yang benar diberi skor 1, sehingga jumlah skor maksimal 20.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

KRITERIA PINDAH MODUL

- Anda dinyatakan lulus dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah mengikuti tes hasil belajar yang telah disiapkan oleh tutor pendamping dengan penguasaan materi dengan nilai ketuntasan 75.
- Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi lagi dengan membaca kembali uraian materi di atas, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.

SARAN REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2006. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia.

BAPPENAS. 2010. *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-1/KS-1)*. Jakarta: BAPPENAS.

BAPPENAS. 2018. *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: BAPPENAS.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara. 2018. *Laki-laki dan Perempuan Provinsi Maluku Utara 2018*. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara.

Dewanti, Parawita. 2018. *Teknik Kultur Jaringan Tanaman: Prinsip Umum dan Metode Aplikasi di Bidang Bioteknologi Pertanian*. Jember: UPT Penerbitan dan Percetakan Universitas Jember.

Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation", dalam *Jurnal Pekommas*, Vol. 3, No. 1, April 2018.

Juliswara, Vibriza. "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 4, No. 2, Agustus 2017.

<http://bpjt.pu.go.id>.

<http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>.

<https://bp2mi.go.id/program-detail/bp3tki-padang-bantu-pulangkan-mardianis/Integrasi%20Informasi%20&%20Pengaduan>.

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4595214/ri-genjot-pembangunan-pelabuhan-tiga-hal-ini-harus-diperhatikan>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/12031151/politik-uang-jelang-pilkada-dinilai-semakin-rawan-saat-pandemi-covid-19>.

https://pal.co.id/product_&_solution/naval_shipbuilding/detail/113?lang=ina.

<https://suaraindonesia-news.com/masuk-zona-merah-melalui-surat-terbuka-imks-minta-perhatian-bupati-dan-gubernur-jatim/>

<https://www.kompasiana.com/rakyatjelata/5e019326d541df59c0579f62/industri-pertahanan-indonesia-10-tahun-kedepan-seperti-apa?page=6>.

<https://www.mongabay.co.id/2019/06/07/ternyata-kelapa-bisa-dibuat-kopyor-semua-dalam-satu-pohon-bagaimana-caranya>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Governmen.

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial, Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Maskun, "Profesionalisme POLRI" dalam <https://www.negarahukum.com/hukum/profesionalisme-polri.html>.

Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-ID" dan Patron-Klien" dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10, No. 1, Juni 2013.

Mansoer, Faried Wijaya. "Perkembangan Aspek Ekonomi dan Manajemen BUMN" dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/40079/22574>.

Nawawi, Hadari. dan Mimi Martini Hadari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nugroho, Heru. "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1, No. 1, 2012.

Prawoto, Nano. "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya" dalam *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1, April 2009.

Rostiyati, Ani. "Sakai Sambaian: Sistem Gotong Royong di Lampung Timur" dalam *Patanjala*, Vol. 4, No. 1, Maret 2012.

Siregar, Abi Pratiwa. "Kinerja Koperasi di Indonesia" dalam *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika* 5 (1). 2020.

Soedjito, Bambang Bintoro. "Peranserta Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia" dalam *Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Januari 1998.

Sumaryoto. "Dampak Keberadaan Jalan Tol terhadap Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi Lingkungannya" dalam *Journal of Rural and Development*, Volume 1, No. 2 Agustus 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PROFIL PENULIS



Nama Lengkap: **Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.**, telepon kantor 0248508014, HP 08122925181, e-mail: atsugeng@mail.unnes.ac.id. Alamat kantor: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pendidikan tinggi ditempuhnya pada S-1 Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara, IKIP Semarang, S-2 Program Studi Sosiologi Agama, UKSW Salatiga, dan S-3 Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riwayat pekerjaan sebagai dosen IKIP Semarang yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Fakultas Ilmu Sosial sejak tahun 1989. Mata kuliah yang diampunya antara lain Teori-teori Sosial Budaya, Sosiologi Politik, dan Kurikulum dan Buku Teks. Kegiatan lain dalam sepuluh tahun terakhir antara lain Anggota Tim Pengembang Kurikulum SMP dan Anggota Tim Pengembangan Tata Kelola Sekolah pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Narasumber Nasional Kurikulum 2013, Penilai Buku Teks dan Non-teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pusat Perbukuan, Pengembang Kurikulum Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan dan Pelatihan Guru, baik pada tingkat sekolah, kabupatæn/kota, provinsi, maupun nasional.

Judul buku yang ditulis, antara lain *Pendidikan Kewarganegaraan SMP* Kelas VII, VIII, IX, Penulisan Bersama, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penulisan Bersama, Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penulisan Bersama, tahun 2011, *Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan Pada Masa Orde Baru*, tahun 2015, *Islam-Jawa: Praktik Keagamaan Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang*, tahun 2015.

Penulisan artikel bersama, antara lain “Dayak and China’s Ethnic Social Relation Patterns in Realizing National Integration In Perspective Functional Structures” dalam *Ponte Academic Journal Sep 2018, Volume 74, Issue 9*; “Environmental Education for *Pemindang* (Case Study on Coastal Communities of Tambaksari Village), dalam *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Volume 313*; “The Creation of Moral Education in Junior High Schools” dalam *International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Volume 24, Issue 1*.